

LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA  
(GCG) PERUMDA BPR BANK  
PURWOREJO TAHUN 2021



JL BRIGJEND KATAMSO NO 51 A PURWOREJO  
TELEPON: (0275) 321490

## BAB I

### PENJELASAN UMUM

Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dibutuhkan oleh bank termasuk juga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rangka meningkatkan kinerja bank untuk melindungi kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai yang berlaku pada industri perbankan. Good Corporate Governance (GCG) juga dibutuhkan untuk menghadapi kompleksnya risiko yang dihadapi bank.

PERUMDA BPR Bank Purworejo sebagai BPR milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang bergerak dalam bidang layanan perbankan dalam melakukan usahanya selalu berupaya untuk tumbuh serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-21/KR.0313/2021 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha dari Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru, perubahan badan hukum secara sah sudah berlaku menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Bank Purworejo. Ditengah pandemi penyebaran Covid 19 yang berdampak pada sector ekonomi khususnya perbankan, Perumda BPR Bank Purworejo tetap konsisten untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam menjalankan kegiatan operasional sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang baik.

Selain visi, misi dan nilai-nilai perusahaan yang telah ditetapkan, PERUMDA BPR Bank Purworejo memiliki berbagai peraturan perusahaan yang mengatur tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja dalam struktur organisasi perusahaan, serta tata tertib Dewan Pengawas dan Direksi yang akan menunjang tercapainya penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 4/ POJK.3/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada PERUMDA BPR Bank Purworejo yang mencakup Governance Structure, Governance Proses dan Governance Output pada faktor-faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PERUMDA BPR Bank Purworejo selalu berpedoman pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :

1. Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
  - a. Bank memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya.
  - b. Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.
  - c. Prinsip keterbukaan oleh bank tidak mengurangi kewajiban dalam memenuhi ketentuan kerahasiaan bank sesuai undang-undang yang berlaku.
2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
  - a. Bank memiliki ukuran kerja semua jajaran berdasarkan ukuran- ukuran yang konsisten, sasaran, usaha dan strategi sebagai pencerminan akuntabilitas bank.
  - b. Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing- masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan dalam pengelolaan bank.
3. Tanggung Jawab (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

- a. Dalam menjaga kelangsungan usahanya Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
- b. Bank berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan.
4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
  - a. Bank menghindari dominasi (pengaruh) yang tidak wajar dari stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan.
  - b. Setiap keputusan berdasarkan obyektivitas serta bebas dari tekanan pihak manapun.
5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
  - a. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran.
  - b. Memberikan/ menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/ POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi BPR, PERUMDA BPR Bank Purworejo melakukan penilaian sendiri (Self Assessment) yang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas Maksimum Pemberian kredit,;
10. Rencana Bisnis Bank,
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Agar PERUMDA BPR Bank Purworejo menjadi BPR yang sehat, maju, dan berkembang maka perlu komitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar GCG (Good Corporate Governance). Hasil self assesment pada posisi per Desember 2021 PERUMDA BPR Bank Purworejo sebagaimana terlampir dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini.

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: Wahyu Argono Irawanto, SE, MM
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR secara profesional dengan mengedepankan prudential banking practices serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemilik.</p> <p>b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan internal BPR.</p> <p>c. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan : Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.</p> <p>d. Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati selaku pemilik.</p> <p>e. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien serta menyampaikan kepada pegawai kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian, antara lain sistem rekrutmen, promosi, remunerasi serta melakukan efisiensi melalui peningkatan dan efektifitas kinerja pegawai.</p> <p>f. Mewujudkan BPR yang baik dan sehat diukur dari pelayanan dan produk yang dibutuhkan nasabah dengan mewujudkan prinsip-prinsip prudential banking practices.</p> <p>g. Merumuskan strategi bisnis, produk dan jasa lain yang menghasilkan keseimbangan rentabilitas, likuiditas serta risiko.</p> <p>h. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audit Intern, audit eksternal (KAP), hasil pengawasan dan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan / atau otoritas lain.</p>	
2.	Nama	: Widi Widjajanta Achmad, SP
	Jabatan	: Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>i. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, melalui :</p> <p>1) Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif serta dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan. Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit risiko baik risiko secara keseluruhan (composite), per jenis risiko, maupun per aktivitas fungsional;</p> <p>2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan exposure risiko yang diambil oleh BPR secara keseluruhan;</p> <p>3) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;</p> <p>4) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi,</p>	

khususnya tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;

5) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan;

6) Memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen yaitu adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi;

7) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan : keakuratan metodologi; penilaian risiko; kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

j. Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan BPR terkait penggunaan Teknologi Informasi serta pelaksanaan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.

k. Merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia secara bertahap dan berkesinambungan melalui perwujudan nilai- nilai perusahaan (corporate value) yang menjadi landasan berpikir, bertindak, serta berperilaku sehingga menjadi budaya kerja perusahaan yang solid dan berkarakter.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

a. Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) Penyesuaian PERUMDA BPR Bank Purworejo Tahun 2021, untuk menyesuaikan kinerja perusahaan yang terdampak pandemi covid-19;

b. Mengesahkan Rencana Bisnis Bank Tahunan PERUMDA BPR Bank Purworejo tahun 2022, yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ;

c. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, fungsi kepatuhan dan manajemen risiko;

d. Meningkatkan pemahaman Pengurus dan Pegawai PERUMDA BPR Bank Purworejo terhadap ketentuan penerapan program APU PPT melalui pelatihan yang berkelanjutan dan pengembangan sistem informasi BPR untuk menunjang penerapan program APU PPT.

Penjelasan Lebih Lanjut :

a. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusan selama tahun 2021.

b. Peningkatan kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank tahun 2021 tidak dapat tercapai dikarenakan adanya pembentukan PPAP terlalu besar

c. Belum seluruhnya melaksanakan Tata Kelola BPR dengan memperhatikan aspek kecukupan jumlah SDM BPR dan kompetensinya.

d. Melaksanakan hasil rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun rekomendasi Dewan Pengawas, antara lain:

1. Segera menyelesaikan pelanggaran dan pelanggaran BMPK pihak tidak terkait serta pihak terkait.

2. Mengupayakan penambahan MODal dari Pemilik dalam hal ini Pemerintah Daerah.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: Bachrul Ulum Ruly, SE, MM
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	a	Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
	b	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
	c	Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari

Pejabat Eksekutif Audit Intern BPR, audit eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan /atau hasil pengawasan otoritas lain.													
2.	<table border="1"> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>Dyah Rumantini, SE, MAP</td> </tr> <tr> <td>Jabatan</td> <td>:</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tugas dan Tanggung Jawab :</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>d Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.</p> <p>e Menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2022 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> </td> </tr> </table>	Nama	:	Dyah Rumantini, SE, MAP	Jabatan	:	Komisaris	Tugas dan Tanggung Jawab :			<p>d Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.</p> <p>e Menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2022 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>		
Nama	:	Dyah Rumantini, SE, MAP											
Jabatan	:	Komisaris											
Tugas dan Tanggung Jawab :													
<p>d Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.</p> <p>e Menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2022 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>													
Rekomendasi Kepada Direksi :													
<p>a. Bank harus lebih efisiensi dan pengendalian biaya</p> <p>b. Mengupayakan sumber dana murah (tabungan) dengan memperluas segmen yang dilayani. c. Menjaga dan meningkatkan kerjasama dengan intitusi pendidikan yang ada di Kabupaten Purworejo.</p> <p>d. Mengoptimalkan promosi, karena kondisi pandemi lebih dioptimalkan dengan promosi digital.</p> <p>e. Penggunaan dana linkage diorientasikan untuk penggunaan yang produktif (kredit) dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>f. Ekspansi kredit pegawai dan umum serta kredit UMKM</p>													
Penjelasan Lebih Lanjut :													
Dewan Pengawas meminta kepada jajaran Direksi Perumda BPR Bank Purworejo untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dengan mengkoordinasikan dengan seluruh Pejabat Eksekutif dan seluruh pegawai, sehingga seluruh permasalahan yang terjadi segera terselesaikan.													

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Bank belum wajib membentuk komite manajemen risiko	

## b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Tidak terdapat rekomendasi lain		

## c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut NIHIL karena Bank belum wajib membentuk Komite			

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Wahyu Argono Irawanto, SE, MM	Rp0,00	0%
2.	Widi Widjajanta Achmad, SP	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			

Kedua Direksi tidak memiliki saham, karena Seluruh Saham (100%) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Wahyu Argono Irawanto, SE, MM			
2.	Widi Widjajanta Achmad, SP			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kedua Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

## C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Wahyu Argono Irawanto, SE, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Widi Widjajanta Achmad, SP	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi lain dan dewan pengawas				

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Wahyu Argono Irawanto, SE, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Widi Widjajanta Achmad, SP	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lain maupun seluruh anggota dewan pengawas				



## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Bachrul Ulum Ruly, SE, MM	Rp0,00	0%
2.	Dyah Rumantini, SE, MM	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki saham.			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Bachrul Ulum Ruly, SE, MM			
2.	Dyah Rumantini, SE, MAP			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki saham pada perusahaan lain.				

## E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Bachrul Ulum Ruly, SE, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Dyah Rumantini, SE, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak mempunyai hubungan keuangan.				

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Bachrul Ulum Ruly, SE, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Dyah Rumantini, SE, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Pengawas tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi dan anggota Dewan Pengawas lain.				

## F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp925.546.200,00	2	Rp302.400.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp80.000.000,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	2	Rp81.606.000,00	2	Rp18.133.000,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp1.087.152.200,00		Rp320.533.000,00

### 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)			
		Direksi		Dewan Komisaris	
1.	Perumahan	Tidak ada		Tidak ada	
2.	Transportasi	Mobil Dinas (2)		mobil Dinas (1)	
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS (2)		Tidak ada	
4.	Fasilitas Lainnya	Pulsa (2)		Tidak ada	
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dirut	DirKep	KetDew	AngDew		
Transportasi		Mobil dinas	Mobil dinas	Mobil dinas	Tidak ada
Asuransi Kesehatan		BPJS	BPJS	Tidak ada	Tidak ada
Telepon seluler		Pulsa	Pulsa	Tidak ada	Tidak ada

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	3 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio Gaji Terendah dan tertinggi	
1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 14% : 86%	
2) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 44% : 56%	
3) rasio gaji Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah: 44% :56%	
4) rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi: 46% : 56%	
5) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi: 22% : 78%	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	15 April 2021	13	<p>Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2021.</p> <p>1. Divisi Bisnis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah relaksasi sebanyak 351 nasabah dengan plafond 95M dan osc 90M.</li> <li>- Dana masyarakat secara keseluruhan tercapai sebesar 99,18% dari RBB bulan Maret 2021 serta rencana peluncuran kredit sanitasi dan air bersih yang saat ini selesai tahap analisis bisnis.</li> <li>- Melakukan promosi ke Bumdes untuk menawarkan keagenan /PPOB yang kerjasama dengan Fastpay.</li> <li>- Melakukan penagihan insentif guna menekan NPL.</li> </ul> <p>2. Divisi Operasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan kegiatan operasional bank berjalan efektif</li> <li>- Melaksanakan dan meningkatkan PPOB guna meningkatkan fee based income.</li> </ul> <p>3. Divisi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai</li> </ul>

			<p>dengan melakukan pendidikan dan pelatihan secara daring maupun tatap muka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan rotasi dan promosi jabatan dalam rangka pemenuhan struktur organisasi agar berjalan efektif dan efisien.</li> <li>- Melakukan perubahan bentuk badan hukum ke OJK baik ijin Prinsip dan ijin pengalihan usaha serta merndapatkan NIB dr BKPMRI</li> <li>- Realisasi Pengadaan Inventaris.</li> <li>- Evaluasi Pelaksanaan KPI, komitmen dan obyektif.</li> </ul>
2.	23 Juli 2021	2	<p>Dihadiri Ketua dan anggota Dewan Pengawas, Membahas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian kinerja bank pada Triwulan II tahun 2021 dengan perbandingan Triwulan tahun sebelumnya.</li> <li>- TKS triwulan II, NPL dan rencana kerja yang telah dilaksanakan dalam triwulan II</li> </ul>
3.	22 Oktober 2021	2	<p>Dihadiri Ketua dan anggota Dewan Pengawas, Membahas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian kinerja bank pada Triwulan III tahun 2021 dengan perbandingan Triwulan tahun sebelumnya.</li> <li>- TKS triwulan III, NPL dan rencana kerja yang telah dilaksanakan dalam triwulan III</li> </ul>
4.	22 November 2021	12	<p>Pembahasan mengenai RBB tahun 2022 : RBB, tingkat kesehatan kebijakan</p>
5.	13 Desember 2021	8	<p>Pembahasan mengenai Tindal Lanjt Introsuksi Pemeriksaan pemerintah khusus pada BPR</p>
6.	21 Desember 2021	5	<p>Dihadiri Direktur Kepatuhan, PEAI, Kadiv Bisnis, Kabag Pelayanan, Plt Kabag Kredit Membahas tentang Penyelesaian Action Plan Pelanggaran BMPK an Tri Lestari direktur PT Kartika Zidan Pratama.</p>
7.	27 Desember 2021	6	<p>Dihadiri Direktur Kepatuhan, PEAI, PE Kepatuhan &amp; MR, Kadiv Bisnis, Kabag Pelayanan, Plt Kabag Kredit Membahas tentangTindal lanjut kendala relaksasi kredit .</p>
<p>Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :</p>			
<p>Inti Pembahasan dalam setiap Rapat adalah membahas hasil kinerja , Dewan Pengawas memberikan masukan pada Direksi untuk mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah.</p>			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Bachrul Ulum Ruly, SE, MM	3	4	100%
2.	Dyah Rumantini, SE, MAP	3	4	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Memantau perkembangan kinerja bank, memberikan usulan kepada direksi dan solusi atas permasalahan yang dihadapi bank.				

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal* (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum ya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum ya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum ya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum ya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak terjadi penyimpangan internal (froud) ditahun 2021								

## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
NIHIL		

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan ditahun 2021							

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	31 Desember 2021	Sosial	Jenis Kegiatan sosial selama tahun 2021 : 1 Bantuan Bencana Alam Rp 3.000.000,- 2 Bantuan Sosial Kemasyarakatan Rp 48.205.750,- 3 Bantuan Dalam Bidang Pendidikan Rp 1.000.000,- 4 Bantuan Dalam Bidang Keolahragaan Rp 4.000.000,- 5 Bantuan Penanganan Pandemi Covid-19	Sekolah dan masyarakat umum	Rp74.375.750,00

			Rp 4.670.000,- 6 Bantuan Pemberdayaan UMKM Rp 13.500.000,-  JUMLAH TOTAL Rp 74.375.750,-		
--	--	--	---	--	--

**Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik**

PERUMDA BPR Bank Purworejo tidak memberikan dana bantuan dalam kegiatan politik, namun memberikan bantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat lingkungan sekitar , pendidikan dan bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.

### BAB III

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PERUMDA BPR BANK PURWOREJO  
 Alamat : JL BRIGJEND KATAMSO NO 51 A PURWOREJO  
 Nomor Telepon : (0275) 321490  
 Posisi Laporan : Desember 2021  
 Modal Inti : Rp22.705.074.965,00  
 Total Aset : Rp270.705.296.016,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PERUMDA BPR BANK PURWOREJO Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.7 dengan predikat Cukup Baik (3)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.31	0.462
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.1	0.315
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3	0.3
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	3.19	0.319
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.88	0.288
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.1	0.053
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3.28	0.328
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	3.7	0.278
10	Rencana Bisnis BPR	2.84	0.213
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.1	0.158
Nilai Komposit			2.7
Predikat Komposit			Cukup Baik



## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.31)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Bank cukup baik

### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.1)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas cukup baik

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Bank Belum wajib membentuk Fungsi Komite MR

### 4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 3)

Tidak Terdapat Benturan Kepentingan

### 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 3.19)

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank masih belum maksimal

### 6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.88)

Penerapan Fungsi Audit Intern Bank belum maksimal

### 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2.1)

Penerapan Fungsi Audit eksternal cukup memadai

### 8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 3.28)

Bank Belum menerapkan Fungsi Manajemen Risiko secara berkala

### 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 3.7)

Terdapat Pelanggaran BMPK pada Debitur an. Tri Lestari, Ardani Yusuf, Alimudin

### 10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.84)

RBB telah mencamtumkan rencana jangka pendek dan panjang

### 11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.1)

Laporan Keuangan Bank sesuai kondisi yang ada

### C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan hasil perhitungan dalam kertas kerja Self Assessment Tata Kelola posisi akhir Desember 2021, dapat disampaikan kesimpulan umum sebagai berikut :

1. Nilai Komposit Tata Kelola.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Nilai Komposit 2,7 dengan Peringkat Komposit Cukup Baik

Mengetahui,



Bachrul Ulum Ruly, SE, MM  
Ketua Dewas



Purworejo, 21 April 2022  
PERUMDA BPR Bank Purworejo  
Direksi,

Wahyu Argono Irawanto, SE, MM  
Direktur Utama

